



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN
TA. 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang secara substansial menjadi penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RENJA Perubahan ini sesungguhnya mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan stakeholders terhadap Kabupaten Mamuju.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima Kasih.

Mamuju, Juli 2025

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian**



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP.197901022011011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Catatan Penting	36
4.2 Kaidah Pelaksanaan	37
4.3 Rencana Tindak Lanjut	38

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	7
2.	Tabel 2.2 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	13
3.	Tabel 2.3 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	14
4.	Tabel 2.4 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	16
5.	Tabel 2.5 Analisis Hasil Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen RENJA Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, RENJA Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah.

Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan RENJA Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang pada

akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;

10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ini adalah sebagai panduan dalam menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang mungkin terjadi. Ini termasuk penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang baru atau perubahan anggaran yang tidak terduga serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien dalam penataan ulang prioritas dan alokasi anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. Perubahan Rencana Kerja ini juga bermaksud untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan pada anggaran tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Menanggapi Dinamika Situasi dan Kondisi** : Untuk mengatasi perubahan mendadak dalam situasi atau kondisi yang mempengaruhi perencanaan, seperti krisis ekonomi atau perubahan kebijakan pusat
2. **Memperbaiki Kinerja dan Hasil Pembangunan** : Menyusun perubahan RKPD bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja program dan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana awal atau tidak memberikan hasil yang diharapkan
3. **Menyesuaikan Anggaran dan Prioritas** : untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan aktual serta memastikan bahwa prioritas pembangunan tetap relevan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat
4. **Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan** : Meningkatkan proses perencanaan dan pengelolaan daerah agar lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan
5. **Menjamin Ketercapaian Sasaran dan Indikator Kinerja** : Untuk memastikan bahwa sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana awal tetap dapat tercapai meskipun ada perubahan dalam konteks atau alokasi anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, proses penyusunannya, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta latar belakang adanya perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Mamuju, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Berisikan cacatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Berisikan bagaimana Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Memuat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN TERHADAP RENJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang dikaitkan dengan sasaran untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Berikut kami sampaikan rewiu terhadap hasil evaluasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Pergeseran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 3.626.291.167 dengan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 1.729.097.324 atau 30,77 persen dan realisasi kinerja 29,14 persen dengan predikat Sangat Rendah "SR".
2. Sebagian besar Prgram/Kegiatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II telah berjalan lancar dan berproses dengan baik meskipun masih terdapat hambatan yang menyebabkan sehingga masih kecilnya realisasi keuangan.
3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sampai dengan triwulan II ini realisasinya masih belum menunjukkan hasil kinerja yang signifikan dikarenakan beberapa hal. Dan untuk hasil penilaian AKIP Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju mendapat menilai sebesar 69,00 poin dengan kategori "Baik".

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informatika dan Persandian	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	62 %	69 %	79 %	84 %	94 %
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,6	3	2.35	2,5	2,75
		Indeks IPS	N/A	N/A	1,8	1,9	2
	Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	33 %	44 %	56 %	67 %	78 %
	Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	B	BB	BB	A	AA

* Huruf yang di Bold adalah Kondisi akhir yang ingin di capai pada tahun berkenaan

Formulir E.8
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD :

1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah : 84 %
2. Indeks SPSE : Nilai 2,5
3. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah : 67 %
4. Nilai AKIP : Predikat A

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15																					
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR YANG DI LAKSANAKAN 2.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																																																	
I	Peningkatan Layanan urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	16.449.905,383	77%	12.609.906,408	20	3.278.570,657	21%	681.882,767	28%	922.168,882	0%	-	0%	-	0,5	1.604.051,649	2,45	48,93	1,26	14.213,958,057	1,26	86,41	Diskominfosip																						
LI		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun	50	dok	113.000,000	30	71.961,600	10	32.890,750	5	1.727,000	3	3.486,000	-	-	-	7	5.213,000	70,00	15,85	37	77.174,600	74,00	68,30	Diskominfosip																							
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10	dok	27.000,000	6	21.117,660	2	22.971,000	-	-	1	1.370,000	-	-	-	1	1.370,000	50,00	5,96	7	22.487,660	70,00	83,29	Diskominfosip																							
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang disusun	10	dok	27.000,000	6	21.161,740	2	5.078,750	-	-	1	616,000	-	-	-	1	616,000	50,00	12,13	7	21.777,740	70,00	80,66	Diskominfosip																							
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA yang disusun	10	dok	32.000,000	6	13.989,000	2	1.673,000	1	1.038,000	-	-	-	-	-	1	1.038,000	50,00	62,04	7	15.027,000	70,00	46,96	Diskominfosip																							
4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	dok	27.000,000	12	15.693,200	4	3.168,000	4	689,000	-	-	1	1.500,000	-	-	4	2.189,000	100,00	69,10	16	17.882,200	80,00	66,23	Diskominfosip																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dok/laporan adm. keuangan yang disusun	5	lap	13.366.277,483	3	10.188.215,695	36	2.800.545,857	6	645.404,481	12	776.804,609	-	-	-	18	1.422.209,090	50,00	50,78	21	11.610.424,785	420,00	86,86	Diskominfosip																							
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbavarkan	170	org/Bln	12.938.152,083	34	10.049.122,593	12	2.737.776,057	3	630.434,481	3	744.679,609	-	-	-	6	1.375.014,090	50,00	50,22	40	11.224.136,685	23,53	88,30	Diskominfosip																							
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	org	223.266,000	10	87.687,600	12	5.376,000	3	14.970,000	3	27.720,000	-	-	-	6	42.690,000	50,00	83,09	16	190.377,600	32,00	58,40	Diskominfosip																							
3		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	60	dok	204.899,100	12	51.405,500	12	11.393,800	-	-	6	4.505,000	-	-	-	6	4.505,000	50,00	39,54	18	55.910,500	30,00	27,29	Diskominfosip																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	11.670,000			12	6.297,000	3	800,000	3	4.844,000	-	-	-	6	5.644,000	50,00	89,63	6	5.644,000	50,00	48,36	Diskominfosip																							
1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	11.670,000			12	6.297,000	3	800,000	3	4.844,000	-	-	-	6	5.644,000	50,00	89,63	6	5.644,000	50,00	48,36	Diskominfosip																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5	lap	4.410.000,000	3	632.399,933	1	87.956,630	0,25	7.157,000	0,25	12.675,945	-	-	-	1	19.832,945	50,00	22,55	4	652.232,878	70,00	57,16	Diskominfosip																							
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	135	Paket	350.000,000	58	225.800,500	1	1.331,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	58	225.800,500	42,96	64,51	Diskominfosip																								
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	10	Paket	106.000,000	6	55.387,000	2	3.899,600	1	2.767,000	-	-	-	-	-	1	2.767,000	50,00	70,96	7	58.154,000	70,00	54,86	Diskominfosip																							
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	130,000	lembar/ Paket	67.000,000	46,579	19.251,840	5	792,000	-	-	2	274,750	-	-	-	2	274,750	40,00	34,89	46,581	19.525,590	35,83	29,14	Diskominfosip																							

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikordinasikan	10	Lap	618,000,000	6	331,960,593	20	81,935,430	2	4,390,000	1	12,401,195	-	-	-	-	3	16,791,195	15.00	20.49	9	348,751,788	90.00	36.43	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
IV		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	lap	229,000,000	3	413,241,500	5	51,846,000	-	-	2	42,110,900	-	-	-	-	2	42,110,900	40.00	81.22	5	455,352,400	100.00	198.84	Diskominfosip	
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6	Jenis	45,000,000	-	-	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip		
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan	20	Jenis	184,000,000	16	413,241,500	5	51,846,000	-	-	2	42,110,900	-	-	-	-	2	42,110,900	40.00	81.22	18	455,352,400	90.00	247.47	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
IVI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	lap	1,260,814,200	3	1,105,837,818	1	274,817,870	0.25	17,836,286	-	80,164,628	-	-	-	-	0	98,000,914	25.00	35.66	3	1,203,838,732	65.00	95.48	Diskominfosip	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	15	Jenis	615,000,000	9	683,551,518	12	239,132,000	3	15,836,286	3	65,248,128	-	-	-	-	6	81,084,414	50.00	33.91	15	764,635,932	100.00	124.33	Diskominfosip	
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	Jenis	89,752,200	12	20,759,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	12	20,759,400	48.00	23.15	Diskominfosip		
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109	org	556,062,000	91	401,526,900	12	39,685,870	3	2,000,000	3	14,916,500	-	-	-	-	6	16,916,500	50.00	47.40	57	418,143,400	54.29	73.25	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
IVII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	lap	339,814,000	3	198,249,862	1	24,246,550	0.25	8,958,000	0	6,926,800	-	-	-	-	1	15,884,800	50.00	65.59	4	214,134,662	70.00	63.02	Diskominfosip	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara	35	unit	243,000,000	21	167,541,862	7	17,431,550	1	8,388,000	-	4,421,800	-	-	-	-	1	12,809,800	14.29	73.49	22	180,351,662	62.86	74.22	Diskominfosip	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	Jenis	35,814,000	7	20,520,000	10	4,450,000	1	570,000	1	170,000	-	-	-	-	2	740,000	20.00	16.63	9	21,320,000	60.00	59.53	Diskominfosip	
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	5	unit	61,000,000	1	10,128,000	1	2,335,000	-	-	1	2,335,000	-	-	-	-	1	2,335,000	100.00	100.00	2	12,463,000	40.00	20.43	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program I)																												
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program I)																												
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
II		Terwujudnya layanan Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik	100	%	6,058,049,490	26%	1,556,681,351	20	184,307,740	19%	34,321,900	23%	42,794,000	0%	-	-	43%	77,115,900	2.09	41.84	1	1,556,681,351	0.68	25.70	Diskominfosip	
III		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipublikasi	100	%	6,058,049,490	26%	1,556,681,351	20	184,307,740	19%	34,321,900	23%	42,794,000	0%	-	-	-	42%	77,115,900	2.09	41.84	1	1,556,681,351	0.68	25.70	Diskominfosip	
1		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan dan Aspirasi Publik melalui media online	250	aduan	120,000,000	114	16,461,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	114	16,461,250	45.60	13.72	Diskominfosip	
2		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah	1800	Lap	932,000,000	565	128,316,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	565	128,316,780	31.39	13.77	Diskominfosip	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2025 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
3		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang dipublikasikan melalui media daring	450	konten	650,000,000	136	114,240,900	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	136	114,240,900	30.22	17.58	Diskominfo					
4		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	5	media (radio)	1,426,374,745	3	292,350,785	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	3	292,350,785	60.00	20.50	Diskominfo					
5		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelaksanaan pelayanan informasi publik	226	kal	323,400,000	62	70,778,630	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	62	70,778,630	27.43	21.89	Diskominfo					
6		Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama (sponsored) dengan Media Massa	250	media	2,008,274,745	82	784,533,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	82	784,533,000	32.80	39.07	Diskominfo					
7		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Kemitraan Komunitas yang dibina	125	klp	598,000,000	217	150,000,006	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	217	150,000,006	173.60	25.08	Diskominfo					
8		Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dinas pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12	Lap	160,072,000	-	-	12	80,802,740	3	23,400,000	3	15,381,500	-	-	-	6	38,781,500	50.00	45.00	6	38,781,500	50.00	24.23	Diskominfo			
9		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi Yang Aktif Mendsemnasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60	Komunitas	61,752,000	-	-	60	28,726,500	5	2,720,000	2	1,100,000	-	-	-	7	3,820,000	11.67	13.30	7	3,820,000	11.67	6.19	Diskominfo			
10		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik	20	permohon	6,232,000	-	-	20	2,361,500	-	-	-	361,500	-	-	-	361,500	0.00	15.31	-	361,500	0.00	5.80	Diskominfo				
11		Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	100	%	49,792,000	-	-	100	31,489,000	25	3,370,400	25	2,180,000	-	-	-	50	10,550,400	50.00	33.51	50	10,550,400	50.00	21.19	Diskominfo			
12		Penyusunan Konten Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	140	Konten	65,212,400	-	-	140	40,928,000	3	4,831,500	32	18,771,000	-	-	-	35	23,602,500	25.00	57.57	35	23,602,500	25.00	35.55	Diskominfo			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																													
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program II)																													
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program II)																													
2.16 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																													
III		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE	100	%	3,555,000,000	46%	1,623,216,684	20	122,136,970	11%	13,234,000	0%	-	0%	-	11%	40,534,775	0.54	33.49	2.63	1,623,216,684	2.63	45.66	Diskominfo				
III.I		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	%	3,555,000,000	46%	1,623,216,684	20	122,136,970	11%	13,234,000	2.06%	27,297,775	0%	-	0%	217%	40,534,775	10.86	33.49	2.63	1,653,748,459	2.63	46.80	Diskominfo			
1		Penstabilan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan Pengawasan e-government	10	Lap	250,000,000	8	5,985,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	8	5,985,550	80.00	2.39	Diskominfo				
2		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyimpan data pada pusat data Pemerintah Daerah	44	OPD	25,000,000	-	7,405,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	7,405,900	0.00	29.62	Diskominfo				
3		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah regulasi dan rencana induk SPBE yang disusun	2	ciok	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo				
4		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem komunikasi intra periode yang dikelola	10	Aplikasi (web)	3,000,000,000	6	1,559,734,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	6	1,559,734,280	60.00	51.99	Diskominfo				
5		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan	5	Titik	130,000,000	1	19,328,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1	19,328,500	20.00	14.87	Diskominfo				

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Trivulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
6		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem SPBE	Jumlah Laporan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1	Lap	50,000,000	1	30,773,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1	30,773,454	100.00	61.54	Diskominfosip							
7		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	89	Lap	87,995,700	12	44,587,970	3	15,194,000	3	13,062,775	-	-	-	-	6	24,256,775	50.00	54.40	6	24,256,775	6.74	35.67	Diskominfosip							
8		Koordinasi Penyusunan dan/atau Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	89	%	30,750,000	2	9,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip								
9		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	89	%	24,085,000	12	19,955,000	3	2,040,000	3	8,550,000	-	-	-	-	6	10,590,000	50.00	53.07	6	10,590,000	6.74	43.97	Diskominfosip							
10		Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/kota Cerdas	89	%	89,611,000	12	47,694,000	-	-	6	5,685,000	-	-	-	-	6	5,685,000	50.00	11.92	6	5,685,000	6.74	6.34	Diskominfosip							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			37.50	29.85			70.06	61.50								
Predikat kinerja																					S	S			S	R						
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program III)																							37.50	29.85			70.06	61.50				
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program III)																								S	R			S	R			
2.20 URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK																																
IV	Terselenggaranya Kegiatan Statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100	%	44,980,000	-	80	23,222,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip								
IV.I		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral PD Kabupaten/Kota	100	%	44,980,000	-	80	23,222,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip								
1		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Rilis Tepat Waktu	80	%	7,769,000	-	80	2,296,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip								
2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah diintegrasikan ke dalam Satu Data	1	Keg	24,767,000	-	1	11,396,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip								
3		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1	Dok	12,445,000	-	1	9,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfosip								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat kinerja																							FALSE	FALSE			FALSE	FALSE				
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program IV)																									0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program IV)																										FALSE	FALSE			FALSE	FALSE	
2.21 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN																																
V	Meningkatnya pengelolaan dan pengamanan informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100	%	503,198,949	18%	65,798,105	24	18,053,450	6	1,378,000	33%	6,020,000	-	-	7	7,398,000	27.17	40.98	16	73,196,105	32.20	28.54	Diskominfosip							
VI		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	50	jenis	325,198,949	9	47,840,345	12	8,013,000	3	848,000	-	-	-	3	1,648,000	25.00	20.57	12	49,488,345	24.00	15.22	Diskominfosip								
1		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah	10	Lap	160,510,127	3	10,141,600	12	8,013,000	3	848,000	-	-	-	3	1,648,000	25.00	20.57	5	11,789,600	50.00	7.35	Diskominfosip								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026. Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Hasil analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 2.2
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya
Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	33,19 %

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Penyebaran Informasi Terkait dengan Pencegahan Stunting, Sosialisasi Sampah dan Diseminasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu melalui penyebaran informasi lewat kendaraan keliling sebanyak 9 kali di 7 Kecamatan selama Januari-Juni;
2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 3 kali untuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
3. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju;

4. Terpublikasinya peliputan kegiatan Kepala Daerah dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 155 kali selama bulan Januari-Juni melalui media sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
5. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 95 kali rilis dan media cetak sebanyak 4 kali rilis selama Januari-Juni;
6. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui Lapor SP4N sebanyak 3 aduan selama Januari-Juni, yang mana aduan tersebut telah terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan.

2.2.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 2.3
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	Proses
	Indeks IPS	1,9	N/A

Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting KDH/WKDH serta Perangkat Daerah sebanyak 36 Kegiatan selama Januari-Juni terkait ;
2. Tersedianya data Desa dan Puskesmas yang berada di pedalaman dan terpencil yang belum tersedia jaringan internet yaitu 39 Desa di 10 Kecamatan dan 9 Puskesmas.
3. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sampai saat ini masih dalam tahap persiapan sosialisasi untuk Perangkat Daerah dan sekaligus pengumpulan data terkait penggunaan instrumen 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan

Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

4. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website Pemerintah Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang menjadi tanggung jawab DISKOMINFOSIP.

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Penyelenggaraan SDI Kab.Mamuju yaitu Forum SDI, Tim SDI, Kebijakan SDI dan Diseminasi SDI;
2. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat, akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan EPSS tahun depan yaitu dengan Penetapan Diknas dan Disdukcapil sebagai produsen data untuk EPSS tahun 2025 dan Pengelolaan E-Walidata pada aplikasi SIPD;
3. Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar yang telah memiliki rekomendasi dari pembina data yaitu BPS.

Kegiatan Statistik Sektoral ini belum maksimal di laksanakan karena sampai saat ini Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Dinas Kominfo masih pada tahap pembahasan di Provinsi sehingga ada beberapa kebijakan terkait kegiatan statistik sektoral belum dapat dilaksanakan sehingga program tersebut belum nampak capaian kerjanya.

2.2.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian

Tabel 2.4
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	80 %

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya pengaktivasian Tanda tangan Elektronik (TTE) dengan menargetkan ASN dengan jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV untuk tahun 2025 dan selama Januari – Juni sudah terealisasi sebanyak 128 ASN yang telah memiliki dan memanfaatkan TTE;
2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 127 kali penerimaan dan pengantaran selama Januari-Juni.

2.2.4 Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima

Tabel 2.5
Analisis Hasil Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	Proses

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tepat waktu;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menunjang pelaksanaan tugas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, kajian hasil evaluasi kinerja maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. Isu-isu ini dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan perkembangan teknologi, tetapi beberapa isu umum yang sering dihadapi meliputi :

1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Keterbatasan Infrastruktur : Keterbatasan atau ketidakmerataan infrastruktur TIK, seperti jaringan internet yang belum merata di daerah terpencil atau pedesaan.

2. Keamanan Informasi dan Data

Ancaman Keamanan Siber : Peningkatan ancaman keamanan siber yang dapat mengancam integritas data dan sistem informasi, seperti serangan malware, ransomware dan peretasan, sehingga kewajiban untuk mematuhi peraturan perlindungan data dan privasi, seperti peraturan perlindungan data pribadi dan undang-undang terkait di tingkat nasional.

3. Layanan Publik Digital

Akses dan Kualitas Layanan : Masalah terkait dengan aksesibilitas dan kualitas layanan publik berbasis digital, termasuk kendala bagi masyarakat yang kurang terampil atau tidak memiliki akses ke teknologi, maka diharapkan tantangan dalam integrasi sistem informasi di berbagai instansi pemerintah untuk menciptakan interoperabilitas dan kemudahan akses data.

4. Penyelenggaraan Statistik Sektor

Pengelolaan Data Statistik sesuai Prinsip SDI : masih belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dan kualitas data yang sesuai prinsip SDI, sehingga belum secara maksimal mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai, dan kebutuhan SDM pengelola data yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan data yang memadai.

5. Pengembangan dan Penerapan Kebijakan

Kebijakan yang Tidak Up To Date : Kebijakan yang belum diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru atau kebutuhan masyarakat yang berubah, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam pengembangan dan penerapan kebijakan TIK.

6. Sumber Daya Manusia

Kekurangan SDM Terampil : Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang TIK, sehingga perlunya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar tetap terampil dalam teknologi terbaru dan metodologi terbaik.

7. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat : Kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi dan layanan digital yang tersedia, dan kurangnya peran masyarakat dalam penyebaran informasi

8. Anggaran dan Pembiayaan

Keterbatasan Anggaran : Keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur TIK dan implementasi proyek-proyek digital yang penting.

Dari beberapa isu umum yang sering dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat disimpulkan untuk isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah Kabupaten Mamuju;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mamuju;
3. Peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju;
4. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;

5. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
6. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
7. Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai;
8. Pengembangan sumber daya aparatur dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang menguasai teknologi informasi.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sejauh ini pada pelayanan dengan adanya fasilitasi aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), sosialisasi baik kepada aparatur dan masyarakat, fasilitasi informasi dan kegiatan rutin lainnya. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju antara lain : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, peningkatan SDM khususnya TIK dan Komunitas Informasi (KIM), pembuatan regulasi atau kebijakan daerah, evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal-hal tersebut di atas perlu disikapi, direncanakan dan dilakukan sebaik mungkin mengingat kegiatan-kegiatan dimaksud sangat prioritas dan strategis.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju antara lain :

- Kapasitas pemahaman aparatur/ SDM terhadap tupoksi masing-masing, dan regulasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tupoksinya tersebut, oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung setiap aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, dari total jumlah aparatur sebanyak 29 orang, sehingga kegiatan pengadaan barang milik daerah masih dibutuhkan pada beberapa tahun ke depan;
- Ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu, idealnya setiap bidang memiliki database masing-masing yang adapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan Perangkat Daerah secara berkala. Dengan basis data yang valid dan perangkat daerah maka program kegiatan yang dilaksanakan akan dapat terukur secara pasti;

- Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju, dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang kurang signifikan sehingga kemampuan Anggaran Belanja Daerah dari tahun ke tahun peningkatannya relatif kecil, oleh karena itu diperlukan alternatif pembiayaan lain seperti bantuan APBD Provinsi maupun APBN.

Bila permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut tidak dapat dicari solusi atau pemecahannya maka akan berpengaruh atau berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Mamuju, terhadap capaian program nasional dan internasional. Capaian target kinerja dari tahun ke tahun akan sulit tercapai dan pada akhirnya visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju maupun Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak dapat terwujud.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Pada Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 3 Urusan, 5 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dan terdapat pergeseran anggaran sub kegiatan. Adapun rincian perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan **Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat** sebesar Rp. 7.187.000,- dan sub kegiatan **Desiminasi Informasi** sebesar Rp. 5.746.000.
2. Penambahan anggaran pada sub kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.700.000,-. Penambahan ini dikarenakan kondisi ban/roda kendaraan dinas operasional sudah tidak layak pakai sehingga perlu diganti guna melakukan kegiatan informasi keliling pada Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi, dan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan sub kegiatan **Relasi Media** sebesar Rp. 5.000.000,- yang dianggarkan untuk peningkatan penyebaran informasi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada masyarakat melalui beberapa media yang sudah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Rencana Kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN PROGRAM											
<i>Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima</i>											
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.818.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.971.000	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.252.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.078.750	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.452.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.673.000	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.609.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.168.000	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2.767.734.817	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2.737.776.057	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86.026.000	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.160.000	Efisiensi Anggaran

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	15.919.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.609.800	Efisiensi Anggaran
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.670.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.297.000	Efisiensi Anggaran
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.202.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.331.600	Efisiensi Anggaran
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.308.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.899.600	Efisiensi Anggaran
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.980.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	792.000	Efisiensi Anggaran
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.081.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.933.430	Efisiensi Anggaran
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	19.020.000	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Efisiensi Anggaran

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	113.192.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	51.846.000	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.132.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.132.000	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.488.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.685.870	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.974.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	24.131.550	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	4.450.000	Efisiensi Anggaran
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.064.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.335.000	Efisiensi Anggaran

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN PROGRAM											
<i>Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik</i>											
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mamuju	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	100%		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mamuju	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	100%		
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi			
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	100%		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	100%		
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasikan					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasikan			

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Kab. Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	160.072.000	Relasi Media	Kab. Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	85.802.740	Efisiensi Anggaran
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	61.752.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	22.179.500	Efisiensi Anggaran
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	12 Laporan	6.237.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	12 Laporan	2.361.500	Efisiensi Anggaran
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dari Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	0	-	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dari Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	0	0	
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	Kab. Mamuju	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	100%	49.792.000	Diseminasi Informasi	Kab. Mamuju	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	100%	26.336.000	Efisiensi Anggaran
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	0	-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	0	
2.16.02.2.01.22	Penyusunan Konten	Kab. Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Laporan	66.212.400	Penyusunan Konten	Kab. Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Laporan	40.928.000	Efisiensi Anggaran

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN PROGRAM											
<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</i>											
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mamuju	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	100%		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mamuju	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE			<p>Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 ini belum diperhitungkan anggaran untuk Ekosistem Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Mamuju, karena mengingat sangat pentingnya Ekosistem Arsitektur SPBE ini untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE Kabupaten Mamuju pada Khususnya guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	25 Perangkat Daerah	0						
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	86%		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	86%		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	89%				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	89%		
2 16 03 2.02 17	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Kab. Mamuju	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	12 Laporan	67.995.700	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Kab. Mamuju	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	12 Laporan	44.587.970	
2 16 03 2.02 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	Kab. Mamuju	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	12 Laporan	30.750.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	Kab. Mamuju	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	12 Laporan	9.900.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 03 2.02 21	penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Laporan	24.085.000	penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Laporan	19.955.000	
2 16 03 2.02 23	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Kab. Mamuju	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	12 Laporan	89.611.000	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Kab. Mamuju	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	12 Laporan	47.694.000	
SASARAN PROGRAM											
<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</i>											
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%		
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data Sataistik Sektoral PD	100%		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data Sataistik Sektoral PD	100%		
2 20 02 2.01 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80%	7.769.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80%	2.296.000	Efisiensi Anggaran
2 20 02 2.01 10	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Kab. Mamuju	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Kegiatan	24.767.000	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Kab. Mamuju	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Kegiatan	11.396.350	Efisiensi Anggaran
2 20 02 2.01 11	pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Kab. Mamuju	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Laporan	12.445.000	pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Kab. Mamuju	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Laporan	9.530.000	Efisiensi Anggaran

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN PROGRAM											
<i>Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian</i>											
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100%		
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	100%		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	100%		
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	21.171.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.960.000	Efisiensi Anggaran
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim			
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	44 Perangkat Daerah	16.000.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	12 Laporan	10.093.450	Efisiensi Anggaran
Total					4.278.482.817					3.626.291.167	

**TABEL 5 (T-C.33.)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU				3,626,291,167					3,620,591,167			
SASARAN PROGRAM													
<i>Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima</i>													
PROGRAM RUTIN					3,278,570,657					3,282,670,657			
2	16			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Mamuju	100%	3,278,570,657		Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3,282,670,657	
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	100%	32,890,750	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24,178,750	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	2 Dokumen	22,971,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,249,000	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mamuju	2 Dokumen	5,078,750	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,828,750	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab. Mamuju	2 Dokumen	1,673,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,933,000	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	4 Laporan	3,168,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,168,000	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Kab. Mamuju	100%	2,800,545,857		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	2,800,277,857
2	16	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Mamuju	34 Orang/ Bulan	2,737,776,057	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	2,737,776,057	
2	16	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	12 Dokumen	51,376,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51,266,000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	16	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	12 Dokumen	11,393,800	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11,235,800
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	100%	6,297,000			Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6,297,000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	12 Laporan	6,297,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,297,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Kab. Mamuju	100%	87,956,630			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%	89,936,630
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	27 Paket	1,331,600	Lain Lain PAD Yang Sah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,331,600
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	2 Paket	3,899,600	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Lain Lain PAD Yang Sah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,879,600
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju	3 Paket	792,000	Retribusi Jasa Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	792,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	12 Laporan	81,933,430	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81,933,430
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	51,846,000			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	51,846,000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mamuju	0	0	0		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju	3 Unit	51,846,000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	51,846,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju	100%	274,817,870			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	274,017,870
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	239,132,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239,132,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	35,685,870	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34,885,870

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju	100%	24,216,550			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	36,116,550
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju	7 Unit	17,431,550	PADAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PEUT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	29,331,550
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju	16 Unit	4,450,000	OPSEN PKB		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4,450,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mamuju	1 Unit	2,335,000	OPSEN PKB		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,335,000
SASARAN PROGRAM														
<i>Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik</i>														
PROGRAM TEKNIS									347,720,510	337,920,510				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						175,507,740			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Kab. Mamuju	100%	62,577,000			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	100%	49,877,000
						Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi			Kab. Mamuju			121,730,740		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Mamuju	100%	62,577,000			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	100%	49,877,000
						Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi			Kab. Mamuju			121,730,740		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi	Kab. Mamuju	12 Laporan	80,802,740	DAU		Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi	12 Laporan	85,802,740
2	16	02	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Mamuju	60 Komunitas	28,726,500	DAU		Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	22,179,500
2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Kab. Mamuju	10 Permohonan	2,361,500	DAU		Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	10 Permohonan	2,361,500
2	16	02	2.01	20	Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	Kab. Mamuju	100%	31,489,000			Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	100 Persen	25,336,000
2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Mamuju	12 Laporan	40,928,000	DAU		Jumlah Konten Informasi Publik	12 Dokumen	39,828,000
SASARAN PROGRAM														
<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</i>														
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Kab. Mamuju	100%	122,136,970		Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 ini belum diperhitungkan anggaran untuk Ekosistem Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Mamuju, karena mengingat sangat pentingnya Ekosistem Arsitektur SPBE ini untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE Kabupaten Mamuju pada Khususnya guna menjawab		100%	121,636,970
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	Kab. Mamuju	86%	122,136,970			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	86%	121,636,970
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Kab. Mamuju	89%				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	89%	
2	16	03	2.02	17	koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Mamuju	1 Dok	44,587,970	DAU		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dok	44,587,970
2	16	03	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Kab. Mamuju	2 Dok	9,900,000	DAU		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dok	9,900,000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	16	03	2.02	21	penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	1 Aplikasi	19,955,000	DAU	tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	19,455,000
2	16	03	2.02	23	koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Mamuju	44 Unit	47,694,000	DAU		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	44 Unit	47,694,000
SASARAN PROGRAM														
<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</i>														
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						23,222,350			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	100%	23,222,350			Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%	23,222,350
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	Kab. Mamuju	100%	23,222,350			Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	100%	23,222,350
2	20	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Mamuju	80%	2,296,000	DAU		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80%	2,296,000
2	20	02	2.01	10	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Mamuju	1 Kegiatan	11,396,350	DAU		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Laporan	11,396,350
2	20	02	2.01	11	Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Mamuju	12 Laporan	9,530,000	DAU		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Dokumen	9,530,000
SASARAN PROGRAM														
<i>Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian</i>														
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Kab. Mamuju	100%	18,053,450			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100%	17,553,450

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	21	01	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	Kab. Mamuju	100%	8,013,000			Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	100%	7,960,000
2	21	01	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	12 Laporan	8,013,000	DAU		Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Laporan	7,960,000
2	21	01	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim	Kab. Mamuju		10,040,450			Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim		9,593,450
2	21	01	2.02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Kab. Mamuju	44 Perangkat Daerah	10,040,450	DAU		Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	44 Perangkat Daerah	9,593,450

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 berpedoman pada RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dengan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini digunakan sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat di implementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

4.1 Catatan Penting

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 antara lain :

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan kebutuhan dan/pagu indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;

3. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
4. Pengelohan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara periodik dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
3. RENJA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025;

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Mamuju;
2. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik sehingga transparansi terhadap program pemerintahan menjadi lebih baik;
3. Peningkatan kualitas keamanan informasi pemerintah Kabupaten Mamuju;
4. Peningkatan cakupan data pada Satu Data Indonesia secara update, akurat dan terintegrasi.

Mamuju, Juli 2025

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian**



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP.197901022011011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara